

ABSTRAK

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dalam upaya pemenuhan hak kreditor akibat debitor wanprestasi, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kreditor dengan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUF meskipun kreditor memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi namun harus memperhatikan cara eksekusinya sehingga eksekusi yang dilakukan dengan cara melawan hukum dimana dilakukan dengan semena-mena. Akibat sering menimbulkan permasalahan dari eksekusi jaminan fidusia menggunakan parate eksekusi maka pada desember 2019 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dibuat penormaan baru Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF putusan tersebut berdampak proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang. Maka isu hukum yang ingin dibahas adalah konsep jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PPU-XVII/2019 dan Upaya hukum kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. konsep parate eksekusi yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUF pada jaminan fidusia pun berubah, dimana untuk menentukan wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh kreditor saja tetapi harus melalui kesepakatan bersama dan kreditor tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut apabila debitor tidak menyerahkan secara sukarela. Pasal 15 ayat (3) atau parate eksekusi dapat dijalankan dengan syarat, terdapat kesepakatan antara kreditor dan debitor tentang wanprestasi debitor, jika tidak maka kreditor harus menempuh upaya hukum lewat penetapan pengadilan atau arbitrase yang menyatakan debitor wanprestasi. Alternatif eksekusi selain melalui parate eksekusi dapat juga dilakukan dengan penetapan fiat pengadilan hal ini akan menimbulkan biaya biaya tambahan diantaranya biaya permohonan eksekusi, biaya sita eksekusi menimbulkan biaya yang tinggi dan waktu yang panjang hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh debitor yang wanprestasi dengan kondisi pengadilan kita yang sibuk dan apabila di tambah lagi kreditor penerima jaminan fidusia yang meminta penetapan fiat pengadilan maka pengadilan akan kewalahan untuk menanganinya. Alternatif lainnya adalah penjualan di bawah tangan, penjualan di bawah tangan adalah alternatif terbaik untuk penyelesaian pelunasan utang apabila debitor wanprestasi.

Kata kunci: jaminan fidusia, parate eksekusi, wanprestasi

ABSTRACT

The fiduciary receiver has right to sell the securited object at his own behalf. In an effort to fulfill the creditor's rights due to defaulting debtors, the execution of fiduciary security which is performed by creditors based on Article 15 paragraph (3) Law number 42 years 1999 on Fiduciary Security (Fiduciary Law). even though the creditor has right to implements the execution but the creditor must pay attention to the procedures of execution so that it is not implemented in a way against the law. As this execution, in this case it uses parate execution, causing several problems over and over, in December 2019 through the Constitutional Court decision Number 18/PPU-XVII/2019 a new norm was made, implemented in Article 15 paragraph (2) and (3) on Fiduciary Law. the decision has an impact on the execution process will take more time and more costs. these are explicitly shows that the execution of fiduciary security looks inefficient as a feature of collateral material which is when the debtor defaults then the process of repayment is being simple, short in time, and low cost. Thus the legal issues to be discussed here are the concept of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision number 18/PPU-XVII/ 2019 and legal efforts of creditors as fiduciary receiver in the implementation of execution of fiduciary security post Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019. the concept of the parate execution contained in Article 15 paragraph (3) of Fiduciary Law on fiduciary guarantees also changed, in which to determine the defaults are not only by the creditors but also through a joint agreement, the creditor cannot directly execute the lien if the debtor does not surrender their lien. Article 15 paragraph (3) or parate execution can be implemented on a condition, there is an agreement dealed by the creditor and the debtor regarding the debtor's default, otherwise the creditor must take legal action through a judicial ascertainment or arbitration which determine the debtor is defaulting. Alternative executions other than parate execution can also be implemented by establishing fiat court ascertainment, but this will incur longer time and additional costs like cost of execution requests and costs of execution itself due to the several problems caused by debtor's default, considering our courts have been in heavy schedule, the court will be overwhelmed by fiat court ascertainment requests. Another alternative is private deed sale, the best alternative for debts redemption if the debtor defaults.

Keywords: *fiduciary security, parate execution, defaults*